© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

ADE NOFIA DESLITA
07951035

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ekonomi dan Pembimbing Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menyatakan bahwa :

Nama	: ADE NOFIA DESLITA
BP	: 07 951 035
Program Studi	: S1 (Strata 1)
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Jalur	: Ekonomi Sektor Publik dan Keuangan Daerah
Judul Skripsi	: Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi

Telah diseminarkan dan disetujui skripsi ini melalui Seminar Hasil Skripsi yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Mengetahui :
Pembimbing

Drs.H.Zulkarnaini Ras,MSi
NIP.195112301979031001

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi,SE,MA	**Prof.Dr.H. FirwanTan,SE,M.Ec.DEA.Ing**
NIP. 195410091980121001	**NIP. 130 812 952**

Apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah SWT

Dia maha mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya

Karena Dialah yang berkuasa atas seluruh jagad raya.

Jangan pernah berpikir jika takdir yang berkehendak demikian,

Karena takdir dapat berubah jika manusia itu sendiri ingin berubah.

Kebahagiaan adalah apa yang kau dapatkan hari ini,

Bukan kemarin, bukan esok, bukan nanti.

Semakin kau mencari bahagia, semakin kau tidak bahagia.

Semakin kau mencari tahu, kau akan semakin tidak tahu.

Raihlah kebahagiaan itu, karena jika tidak, ia akan lepas dari

Genggamanmu seperti burung yang terbang jauh mencari sinar matahari

Di belahan bumi lainnya

Di dunia ini ada beberapa hal yang disebut takdir, sisanya adalah pilihan

Jangan sesali sesuatu yang sudah ditentukan oleh takdir

Karena tanpa kesulitan dan kesedihan,

Kita tidak akan benar-benar menghargai kebahagiaan.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang secara tertulis disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Mei 2011

Ade Nofia Deslita
NIM : 07 951 035

No. Alumni Universitas	ADE NOFIA DESLITA	No. Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl lahir : Sei. Penuh, 27 Desember 1988 b). Nama Orang Tua : Nur Muhammad Agus, SE.ME. dan Sofia, NH c). Fakultas : Ekonomi d). Ilmu Ekonomi e). No.Bp : 07 951 035 f). Tanggal Lulus : 6 Mei 2011 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3, 12 i). Lama Studi: 3 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. H. Ibrahim No : 105, Kota Jambi.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM (PPJU) DI KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2000 - 2009

Skripsi S1 Oleh : Ade Nofia Deslita Pembimbing : Drs.H.Zulkarnaini Ras,MSi

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh efektifitas dan daya pajak (*Tax Effort*) terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum serta kontribusi PPJU tersebut terhadap pajak daerah di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriftif kualitatif yang berguna untuk melihat pertumbuhan PPJU dan kontribusi PPJU terhadap pajak daerah, serta analisis deskriftif kuantitatif untuk menguji pengaruh variable efektifitas dan daya pajak terhadap PPJU. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan untuk mengestimasinya menggunakan kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*). Uji statistik yang dilakukan adalah berupa koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit),* uji F, dan uji t. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode analisisnya dari tahun 2000-2009, dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, BAPEDA Kota Jambi serta DIPENDA Kota Jambi.

Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan PPJU dan kontribusinya terhadap pajak daerah menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun). Berdasarkan hasil pengujian empiris diperoleh bahwa Daya Pajak (*Tax Effort*) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi dengan tingkat kepercayaannya 95 persen. Dimana seiring dengan meningkatnya daya pajak (*tax effort*) penerimaan ppju Kota Jambi juga semakin meningkat. Sedangkan variabel efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pejak penerangan jalan umum di Kota Jambi.

Keywords: Pajak Penerangan Jalan Umum, Efektifitas dan Daya Pajak (Tax Effort)

Skripsi ini telah dipertahankan dalam seminar skripsi dan dinyatakan lulus pada 6 Mei 2011, telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas :

Tanda Tangan			
Nama Terang	**Drs.H.Zulkarnaini Ras,MSi (Pembimbing)**	**Drs. H. Masrizal,M.Soc.Sc (Pembahas I)**	**Ferry Andrianus,SE.MSi (Pembahas II)**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :

Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec,DEA.Ing
NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Universitas Andalas dan mendapat alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi"**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. **Ayahanda** dan **Ibunda tercinta, Nur Muhammad Agus, SE.ME.** dan **Sofia, NH.** yang telah memberikan pengorbanan, nasehat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE.MA.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE.M.Ec.DEA.Ing.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

4. **Ibu Neng Kamarni, SE.M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Bapak Drs.H.Zulkarnaini Ras, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Drs.H.Masrizal,M.Soc.Sc,** dan **Bapak Ferry Andrianus,SE,MSi** selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar hasil sekaligus memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Keluarga BB tercinta : **Linda Junita, SE.ME.** dan **Panca Satrio, SSTP.ME.** serta **Tri Agrian Putra (iitteemm)**, Terima kasih atas semua keceriaan, tawa, canda dan semangat yang tak pernah padam kalian berikan.

10. CphieCkxOk ©ª **Heru Pratama** Yesterday is History, Today is a Gift & Tomorrow is Mystery^_^
11. Sahabat seperjuangan FE + ♫♪ : Cciiffeell, Aaiissyyee, Unyun, Ool, Tika, Sari, Fany, Ika dan Vivi. Congratulation have become master economics (SE). Special For Unyun, Cahyo Aza u Can get it. 👍
12. Community IE FE-FEUA 07: Pak Ouwyon, Bg Daf, kecil, Bg Ade Cs, Defitavina, Yuhu Cs, etc, Nice to meet u all. 👌
13. Community Tapakis 14 Jati : Adistila, Imar Diana, K'intha, Ecy, K'ety, K'Lina, Cally, etc, Thanks For all, cowry for my mistakes. ✌

Semoga Allah swt membalas pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... -

HALAMAN PENGESAHAN i

PERNYATAAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Tujuan 9

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Landasan Teori 12

2.1.1 Keuangan Daerah 12

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 14

2.1.3 Pajak Daerah 16

2.1.3.1 Pengertian Pajak 16

2.1.3.2 Fungsi Pajak 17
2.1.3.3 Asas Pemungutan Pajak 18
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak 19
2.1.4 Macam-macam Pajak 21
2.1.4.1 Menurut Golongan 21
2.1.4.2 Menurut Sifatnya 21
2.1.4.3 Menurut Wewenang Negara 22
2.1.5 Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) 22
2.1.6 Dasar Hukum Pemungutan PPJU 23
2.1.7 Objek dan Bukan Objek PPJU 24
2.1.7.1 Objek PPJU 24
2.1.7.2 Bukan Objek PPJU 24
2.1.8 Subjek Pajak dan Wajib PPJU 24
2.1.9 Tarif PPJU 25
2.1.10 Perhitungan PPJU 26
2.1.11 Daya Pajak (Tax Effort) PPJU 26
2.1.12 Efektifitas Pajak 27
2.2 Penelitian Terdahulu 28
2.3 Kerangka Pemikiran 31
2.4 Hipotesis 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1 Metode Penelitian 34
3.2 Jenis dan Sumber Data 34

3.3 Metode Analisis Data 35
3.3.1 Perkembangan Penerimaan PPJU 35
3.3.2 Kontribusi PPJU terhadap Pajak Daerah 36
3.3.3 Efektifitas dan Daya Pajak PPJU 36
3.3.4 Pengujian Model 38
3.3.4.1 Koefesien Determinasi (R^2) 38
3.3.4.2 Uji F (F-test) 38
3.3.4.3 Uji t (t-test) 39
3.3 Operasional Variabel 40
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI 42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 42
4.1.1 Kondisi Fisik 42
4.1.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan 44
4.1.3 Struktur Perekonomian 47
4.1.3.1 PDRB 47
4.1.3.2 APBD 50
4.1.4 Pajak Daerah 51
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
5.1 Perkembangan Penerimaan PPJU Kota Jambi 60
5.2 Kontribusi PPJU terhadap Pajak Daerah Kota Jambi 62
5.3 Efektifitas PPJU Kota Jambi 65
5.4 Daya Pajak (*Tax Effort*) PPJU Kota Jambi 67

5.5 Hasil Pengujian Regresi 68

BAB VI PENUTUP 73

6.1 Kesimpulan 73

6.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Kategori Pajak Daerah Di Kota Jambi serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 2000 - 2009 5

Tabel 2.1.Pedoman Penilaian dan Kinerja Pengelolan Keuangan 28

Tabel 4.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Jambi Tahun 2010 43

Tabel 4.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2000 - 2009 45

Tabel 4.3. Keadaan Tenaga Kerja di Kota Jambi Tahun 2000 - 2009 46

Tabel 4.4. PDRB Kota Jambi Tahun 2000 - 2009 ADHK Tahun 2000 49

Tabel 4.5. APBD Kota Jambi Tahun 2000 – 2009..... 51

Tabel 4.6. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 52

Tabel 5.1. Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 60

Tabel 5.2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 63

Tabel 5.3.Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 66

Tabel 5.4. Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2000 – 2009 4

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran 32

Gambar 4.1. PDRB Kota Jambi ADHK Tahun 2000 49

Gambar 5.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 62

Gambar 5.2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2000 – 2009 . xvii

Lampiran 2. PDRB Kota Jambi Tahun 2000 – 2009 ADHK Tahun 2000 xviii

Lampiran 3. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear xix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan suatu upaya menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan daerah yang baik adalah sistem pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsip secara berkesinambungan senantiasa menjadi dambaan bagi setiap daerah di tanah air.

Menurut Silalahi (2000) bahwa desentralisasi atau pemberian otonomi yang lebih luas bagi daerah secara lugas memperhitungkan kemampuan ekonomis suatu daerah. Untuk memenuhi persyaratan dan mencapai tujuan pemerintahan yang baik maka pemerintah daerah membutuhkan suatu landasan untuk bergerak lebih leluasa yaitu berupa sistem desentralisasi.

Desentralisasi mencakup pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik, dan administrasi kebijakan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, khususnya di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang kecuali kewenangan di bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi yang nyata dengan

terciptanya keleluasaan daerah seperti tersebut diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang pembangunan di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab atas pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang diemban dituntut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah mengalami perubahan komposisi dan fungsi sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Demikian pula selanjutnya keuangan daerah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah melalui pajak dan pajak guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebebasan untuk mengelola sumber-sumber potensi dan menentukan arah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tanpa adanya intervensi pemerintah pusat akan meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber yang potensial dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam penggunaannya.

Era otonomi daerah tidak hanya mengatur tata hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi lebih jauh juga mendorong pemerintah daerah untuk mampu bersaing secara positif mendapatkan sumber-sumber dana bagi pembangunan daerahnya. Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari pendapatan asli daerah (PAD), tetapi hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah, di samping

penerimaan lainnya yang berupa Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain PAD yang dipisahkan.

Kemampuan pendanaan dari suatu daerah untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat vital, oleh karena itu otonomi daerah tanpa ditunjang oleh kemampuan dalam bidang pendanaan adalah sangat tidak mungkin untuk dapat berjalan dengan baik. Karena itulah maka pemerintah daerah berupaya memberdayakan semua sumber-sumber keuangan daerah secara optimal. Termasuk di dalamnya menggali dan menghimpun penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribaadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Propinsi jambi merupakan salah satu propinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Sebagai salah satu daerah otonom, Provinsi Jambi diberikan keleluasaan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya termasuk keuangan dan penggalian sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan daerahnya, yang diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Jambi yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.

Di Kota Jambi Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain ; (1) Pajak Hotel. (2) Pajak Restoran. (3) Pajak Hiburan. (4) Pajak Reklame. (5) Pajak Penerangan Jalan. (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. (7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, Pajak Daerah menempati posisi kedua yang memiliki kontribusi terbesar setelah Retribusi Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2000 - 2009, pendapatan pajak daerah di Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pajak Daerah Di Kota Jambi
Tahun 2000-2009

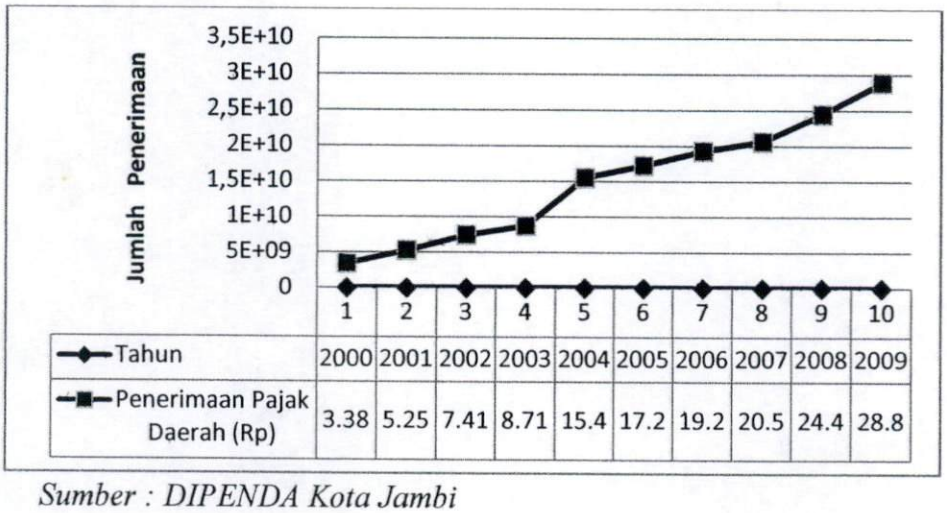

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	3.38	5.25	7.41	8.71	15.4	17.2	19.2	20.5	24.4	28.8

Sumber : DIPENDA Kota Jambi

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah di Kota Jambi selama sepuluh tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Kategori Pajak Daerah Kota Jambi
Serta Kontribusinya terhadaap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 - 2009
(Dalam Rupiah)

No.	Kategori Pajak Daerah	Total Realisasi Penerimaan (Rp)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
1	Pajak Hotel danRestoran	31.533.488.835	20,94
2	Pajak Hiburan	6.250.548.806	4,15
3	Pajak Reklame	21.152.493.681	14,05
4	Pajak Penerangan Jalan	87.974.985.261	58,42
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C	3.131.219.982	2,08
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	597.745.769	0,40
Total Penerimaan Pajak Daerah		**150.640.482.335**	100%

Sumber : DIPENDA Kota Jambi, (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu : Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan selama sepuluh tahun adalah sebesar Rp. 87.974.985.261 yang secara persentase adalah sebesar 58,42%. Kemudian disusul oleh penerimaan Pajak Hotel serta restoran sebesar Rp. 31.533.488.835 dengan persentase sebesar 20,94%. Untuk berikutnya adalah Pajak Reklame dengan total penerimaan sebesar Rp. 21.152.493.681 dan persentasenya sebesar 14,05%. Diantara enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kota Jambi, pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan total penerimaanya selama sepuluh tahun hanya sekitar Rp. 549.745.768 dengan persentase 0,40%. Hal tersebut dikarenakan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula dipungut oleh Dipenda Kota Jambi, sejak tahun

2003 dialihkan pungutannya ke Dipenda Propinsi Jambi. Jadi, angka yang tercantum tersebut merupakan jumlah total penerimaannya selama 3 (tiga) tahun selama pemungutannya oleh Dipenda Kota Jambi.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas bahwa jumlah total penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 87.974.985.261,-. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif dengan persentasenya kontribusinya terhadap pajak daerah adalah sebesar 58,42% . Disamping kontribusi dari pajak penerangan jalan umum yang cukup besar, perkembangan penerimaannya di Kota Jambi selama periode 2000 – 2009 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan penerimaannya secara rata-rata adalah sebesar 32,75% selama sepuluh tahun terakhir yang relatif tinggi diperkirakan cukup efektif. Upaya mendorong peningkatan pajak daerah sangat penting dan perlu dilakukan. Kapasitas pajak dapat menjadi ukuran potensi pajak di Kota Jambi , sementara usaha perpajakan dapat menjadi acuan kesungguhan pemerintah Kota Jambi untuk mengelola potensi pajak yang ada.

Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak dibedakan untuk antara penggunaan rumah

tangga dan penggunaan industri. Adanya perbedaan ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanambahkan modalnya di suatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009"*

1.2 Perumusan Masalah

Pajak daerah sebagai salah satu potensi penerimaan daerah selama ini belum dikelola secara optimal. Secara teoritis peningkatan pendapatan yang tercermin dari peningkatan produksi harus diikuti pula oleh peningkatan penerimaan pajak daerah. Kapasitas pajak di Kota Jambi sendiri masih sangat besar, karena itu diperlukan usaha-usaha yang nyata (*tax effort*) dari pemerintah untuk memungut dan mengelola potensi pajak yang ada secara optimal. Pengelolaan secara optimal memerlukan dukungan dari berbagai elemen, terutama pemerintah daerah untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Dalam membiayai pembangunan daerah di Kota Jambi, dibutuhkan sumber dana yang cukup besar. Dana ini berasal dari pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu dibutuhkan usaha-usaha yang tepat agar potensi tersebut dapat dikembangkan, salah satu potensi penerimaan pendapatan asli daerah tersebut adalah pajak

daerah. Karena pajak merupakan salah satu tulang punggung penerimaan daerah guna mencapai kemandirian, karena itu potensi yang ada harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka memberi kontribusi yang positif terhadap penerimaan daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi dalam sepuluh tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendukung tingginya pencapaian angka tersebut adalah karena besarnya realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum. Hal itu lah yang membuat Pajak penerangan jalan di Kota Jambi merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding pajak daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan umum dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Jambi untuk tahun anggaran 2000 – 2009 ?
2. Bagaimana efektifitas dan daya pajak (*Tax effort*) di Kota Jambi selama 10 tahun terakhir dari pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan umum serta kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Jambi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas dan daya pajak (*Tax effort*) penerangan jalan umum di Kota Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah serta penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Bagi Instansi Terkait, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Jambi khususnya Dinas Pendapatan daerah dan instansi terkait dalam menyusun atau membuat kebijakan yang berkait dengan upaya peningkatan Pendapatan asli daerah.
3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari: halaman judul, , halaman persetujuan / pengesahan, pernyataan original, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan

daftar pustaka. Bagian isi terdiri dari enam bab. Adapun subtansi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada berbagai teori mengenai pajak daerah dan bagian dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan umum. Setelah itu disusun skema kerangka pemikiran yang berujung pada penyusunan hipotesis dalam penelitian yang merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Selain itu, bab ini juga berisi mengenai teori pengujian model penelitian yang akan digunakan.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum subjek penelitian yang terdiri dari : deskripsi objek penelitian dan deskripsi variable penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Dalam bab ini juga dibahas penemuan empiris fungsi pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi dengan menggunakan data time series periode 2000-2009. Fungsi tersebut diperlihatkan oleh suatu persamaan regresi dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian dan kesimpulan yang dapat diambil dari penemuan empiris. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pajak penerangan jalan umum dan pajak daerah di Kota Jambi selama tahun anggran 2000-2009.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah suatu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap fungsi alokasi, khususnya alokasi keuangan pusat kepada daerah otonom, dimana di dalamnya terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan keuangan daerah.

Memperhatikan pemahaman terhadap keuangan daerah di atas maka sebenarnya keuangan daerah mencakup dua komponen penting yaitu fungsi penerimaan dan pengeluaran. Fungsi penerimaan berkaitan erat dengan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk di dalamnya adalah bantuan pemerintah pusat. Sementara fungsi pengeluaran berkaitan erat dengan memanfaatkan dana yang ada untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Mengingat tugas dan fungsi pemerintah daerah yang secara kualitatif dan kuantitatif terus meningkat, konsekuensinya menuntut dana yang lebih besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga perlu diupayakan agar daerah memiliki sumber penerimaan yang ideal yaitu sumber penerimaan yang mempunyai sifat tetap dan selalu mengalami kenaikan.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai cerminan pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas dua bagian yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah : (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. (b) Pendapatan Asli Daerah (PAD). (c) Dana Perimbangan. (d) Pinjaman daerah. (e) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pembangunan yang meliputi : (a) Belanja administrasi umum. (b) Belanja operasi dan pemeliharaan. (c) Angsuran Pinjaman. (d) Pengeluaran tidak tersangka, yang meliputi belanja umum dan belanja cadangan. (e) Belanja Publik yang meliputi belanja modal dan belanja penunjang. (f) Belanja aparatur, yang meliputi belanja modal dan belanja penunjang.

Tjokroamijoyo (1995) menyatakan penerimaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah dan bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah seperti retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah.
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Pendapatan daerah karena pemberina subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah.
6. Bantuan pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pandapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang benar-benar bersumber dari daerah itu sendiri dan pengelolaanya di urus oleh daerah itu sendiri. (Anonim, 1999)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : (1) Pandapatan Daerah, (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah.

Adapun sumber – sumber peneriman dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu : (i) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (ii) Jasa giro. (iii) Pendapatan bunga. (iv) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. *Dana Perimbangan*

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah propinsi atau daerah kabupaten / kota lainnya, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pusat serta penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah tersebut dipergunakan oleh daerah untuk keperluan pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Jadi sehatnya keuangan daerah akan tercermin dari meningkatnya bagian yang dapat dipergunakan bagi pengeluaran pembiayan pembangunan.

2.1.3. Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

> "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbala langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesoebroto :

> "Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya" (Mangkoesoebroto, 1998:181).

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diyujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum" (dalam Mardiasmo, 2003).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" adalah sebagai berikut :

(a) Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

(b) Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif.

2.1.3.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebangsaan yaitu bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Asas tempat tinggal yaitu pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas sumber penghasilan yaitu jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah. (Mardiasmo,2003)

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayaran dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). (Mardiasmo,2003)

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab

kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

2.1.4 Macam-Macam Pajak

2.1.4.1 Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain.

b) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain.

2.1.4.2 Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

2.1.4.3 Menurut Wewenang Negara

1. Pajak Negara

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: (a) Pajak Penghasilan (PPh); (b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM); (c) Bea Materai; (d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

A. Pajak propinsi, terdiri dari:

(a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air; (b) Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (d) Pajak Parkir; (e) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

B. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:

a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (g) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Devas, dkk. (1989) menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik . pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah (dalam Sutrisno,2002).

2.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sebagai penyedia sarana dan prasarana publik, maka pemerintah Kota Jambi berupaya membangun sarana dan prasarana publik termasuk di dalamnya adalah membangun fasilitas lampu penerangan jalan umum.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

2.1.7 Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

2.1.7.1 Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

2.1.7.2 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

1. Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknisi terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

2.1.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industry dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.9. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan

untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Di Kota Jambi, objek pajak penerangan jalan umum terdiri dari lima golongan tarif diantaranya yaitu rumah tangga, bisnis, industri, public dan social.

2.1.10 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

2.1.11 Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut : (Fitriadi, 1999)

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak})t}{(\text{PDRB})t} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak.

2.1.12 Efektivitas Pajak

Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target atau perbandingan antara realisasi dengan potensi sumber penerimaan daerah misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Namum yang sering digunakan sebagai pembaginya adalah target, sehingga tergambar selalu over target. Rasio efektifitas pajak penerangan jalan umum (PPJU) akan menunjukan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PPJU sesuai dengan yang telah ditergetkan atau bahkan melebihi. Kemampuan untuk memperoleh pajak penerangan jalan umum (PPJU) dapat dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100 %.

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJU}}{\text{Target Penerimaan PPJU}} \times 100\ \%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif,

standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Tabel 2.1.

Pedoman Penilaian dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Persentase Pencapaian	Kategori Tingkat Pencapaian	Kriteria
> 100 %	Hasil perbandingan diatas 100%	Sangat Efektif
1	Hasil perbandingan adalah100%	Efektif
< 100 %	Hasil perbandingan dibawah 100%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat dua penelitian terdahulu yang dijadijkan bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.

Indra Riady (2010), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut dan memiliki tujuan untuk menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama tahun 2005 hingga tahun 2009. Selain itu, dilakukan pula perhitungan daya pajak (*tax effort*). Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*). Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat bagaimana kinerja dari

penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak Pajak Penerangan Jalan kemudian perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, untuk daya pajak (*Tax Effort*) perhitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Garut. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah. Sifat studi ini relatif kuantitatif sehingga fenomena yang sifatnya kualitatif belum dapat diakomodasikan dalam bentuk model.

Bachtiar (2003), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi dan memiliki tujuan untuk mengkaji dan manganalisa potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, berupaya untuk menggambarkan proses penarikan pajak daerah di Kabupaten bekasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Rasion, Analisa

Pertumbuhan, Analisa Efektivitas dan Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan menyumbang sebesar 56,65%, dengan demikian potensi yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota tersebut sangatlah besar. Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dilihat dari efektivitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai rasio 100% setiap tahun. Alternatif kebijakan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah adalah memberikan keringanan pajak kepada para pengguna listrik swasta dengan pemakai genset, karena keberadaan genset, kafena keberadaan listrik swasta itu dapat membantu PLN di dalam mencukupi kebutuhan listrik oleh kalangan industri.

Linda (2008), Penelitian ini dilakukan di Propinsi Jambi dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan pajak daerah di Propinsi Jambi serta kontribusinya terhadap PAD dan menghitung tax effort-tax capacity nya. Selama periode 1993 – 2006 secara rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah di atas target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 114,08%. Pencapaian realisasi ini memberikan gambaran bahwa dalam pemungutan pajak daerah di Provinsi Jambi sudah sangat efektif. Dalam periode yang sama penerimaan PAD Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 36,28%. Selama periode 1993-2006 realisasi pencapaian target PAD Provinsi Jambi adalah sebesar 126,07%. Secara rata-rata selama periode 1993-2006 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jambi adalah sebesar 79,29%. Usaha perpajakan di Provinsi Jambi (Tax effort) masih sangat rendah, yaitu

hanya sebesar 8,91 %, hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan upaya pemungutan terhadap basis pajak. Di sisi lain secara rata-rata selama periode 1993-2006 kapasitas penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi adalah sebesar 0,036. Secara parsial variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi adalah jumlah penduduk dan PDRB.

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Apabila penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal melebihi target yang ditetapkan maka Pajak Penerangan Jalan tersebut telah efektif. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan perkembangan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Hal ini dapat terjadi apabila dalam pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara optimal dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah *(tax effort)*. Melalui peningkatan penerimaan pajak daerah diharapkan akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi Kota Jambi.

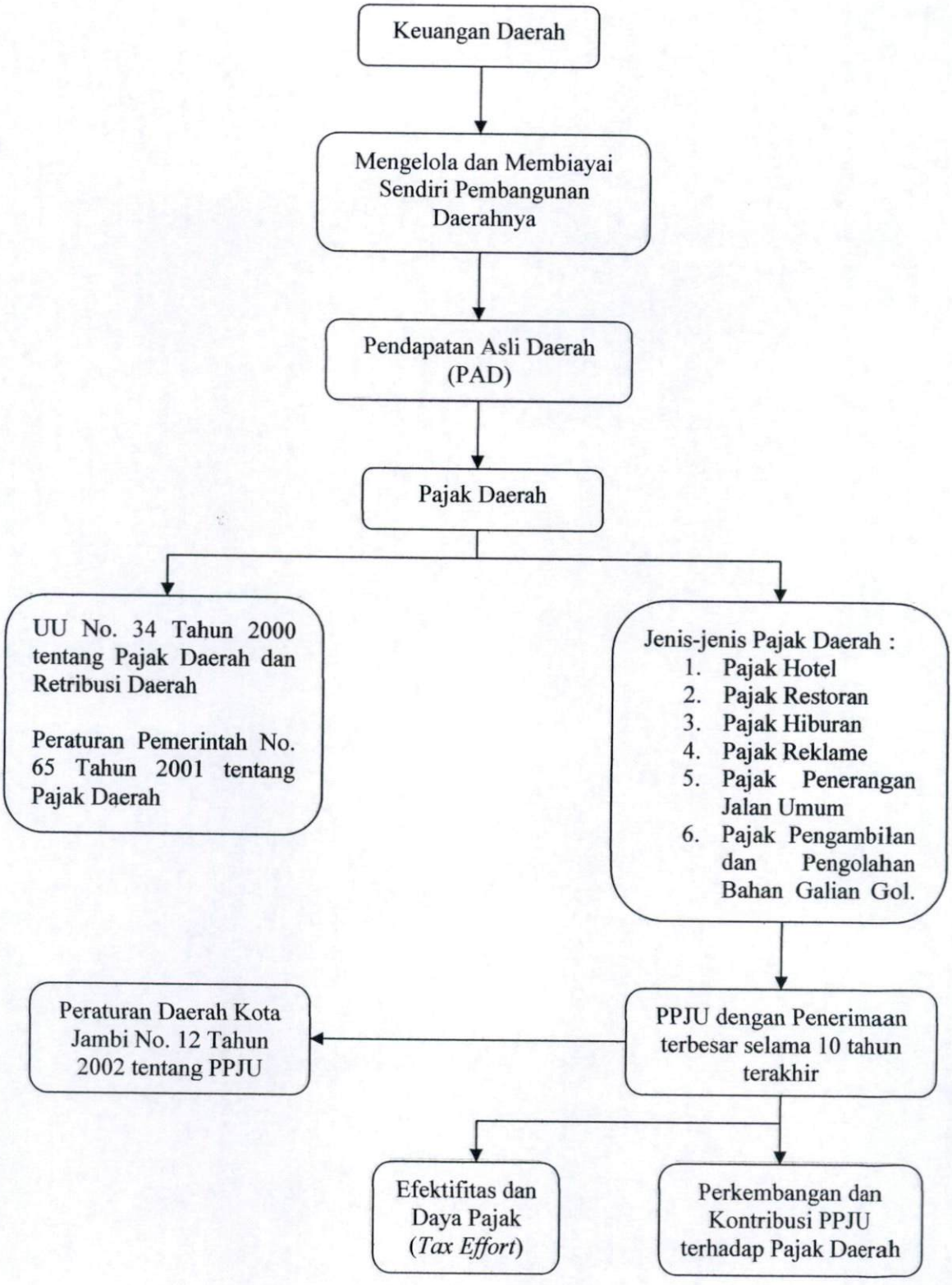

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran (Data Diolah)

2.4 Hipotesis

Seperti telah dikemukakan pada landasan teori, studi sebelumnya dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga efektifitas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi
2. Diduga daya pajak (*tax effort*) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu mempelajari berbagai literatur yang terkait erat dengan penelitian ini seperti : Buku-buku, majalah, brosur dan laporan yang diterbitkan oleh berbagai instansi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa rangkaian masa (time series) selama kurun waktu tahun anggaran 2000 - 2009, yang terdiri dari data :

a. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi tahun 2000-2009, bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi
b. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kota Jambi tahun 2000-2009, bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Jambi
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan selama tahun 2000-2009, bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.
d. Jambi Dalam Angka selama periode tahun 2000-2009, bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jambi
e. Bagian Keuangan Setda Propinsi Jambi

3.3. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Analisis Deskriftif Kualitatif*

Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara melakukan deskripsi terhadap data yang ada. Menjelaskan gambaran dari suatu fenomena yang diperoleh dari tahun ke tahun untuk kemudian menarik kesimpulan.

b. *Analisis Deskriftif Kuantitatif*

Merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara menggunakan alat analisis kuantitatif guna memperoleh gambaran secara keseluruhan pengaruh antara variable independen dan variable dependen.

3.3.1 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Umum

Teknik analisis deskriftif kualitatif digunakan untuk melihat fenomena dan berbagai kebijakan dibidang pajak daerah selama periode penelitian. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu untuk mengetahui perkembangan/pertumbuhan maka digunakan rumus sebagai berikut (Kakisina dan Rumansara, 2000)

$$G_x = \frac{Xi - Xi-1}{Xi-1} \times 100 \quad \text{..... (1)}$$

Dimana:

G_x = Perkembangan pajak penerangan jalan umum (PPJU)

X_i = Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun ke –n

X_{i-1} = Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun Sebelumnya

3.3.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah

Teknik analisis deskriftif kualitatif juga digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah Kota Jambi, maka digunakan formulasi sebagai berikut: (Widodo, 1995)

$$K_x = \frac{\sum PPJ}{\sum PJD} \times 100\ \% \quad \text{..... (2)}$$

Dimana :

K_x = Persentase kontribusi pajak penerangan jalan

$\sum$ PPJ = Jumlah Pajak Penerangan jalan

$\sum$ PJD = Jumlah Pajak Daerah

3.3.3 Efektivitas dan Daya Pajak *(Tax Effort)* Pajak Penerangan Jalan

Untuk menjawab tujuan penelitian ke tiga atau untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJU}}{\text{Target Penerimaan PPJU}} \times 100\ \% \quad \text{..... (3)}$$

Sedangkan untuk mengetahui Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (*Tax Effort*) adalah maka dihunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{(Penerimaan Pajak Daerah)t}}{\text{(PDRB)t}} \times 100\ \% \quad \text{..... (4)}$$

Tehnik analisis deskriftif kuantitatif digunakan untuk melihat gambaran secara keseluruhan pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan dengan pajak penerangan jalan umum tersebut. Metode kuantitatif dimana merupakan pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pemprosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif (Kuncoro,2001).

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Mudrajat (2001), maka untuk menjawab tujuan penelitian ke dua atau untuk mengukur dan menghitung efektifitas dan daya pajak (*Tax Effort*) penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi digunakan fungsi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = f\,(X_1\,,\,X_2,)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad \mathbf{(5)}$$

Selanjutnya fungsi regresi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (Ln) sebagai berikut **(Damodar Gujarati,1991)** :

$$\mathbf{LnY = b0 + b1\ ln\ X_1 + b2\ 1nX_2 + e} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad \mathbf{(6)}$$

Dimana :

Y = Pajak Penerangan Jalan Umum

X_1 = Efektifitas

X_2 = Tax Effort (Daya Pajak)

β_0 = Konstanta

$\beta_{1\text{-}2}$ = Koefisien Regresi Variabel

e = frekuensi gangguan stokhastik

3.3.4 Pengujian Model

3.3.4.1 Koefisien determinasi (R^2)

R^2 digunakan untuk melihat kemampuan variabel-variabel independen (variabel bebas) mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Koefisien determinasi (R^2) memiliki probabilitas $0 \leq R^2 \leq 1$. Artinya, apabila nilai R^2 mendekati 0 berarti kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependent sangat kecil. Apabila nilai R^2 mendekati 1, berarti kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependent semakin besar.

3.3.4.2 Uji F (F-test)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilakukan uji F. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel maka keseluruhan variabel independen berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika F-hitung kecil dari F-tabel maka variabel independent secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Secara statistik rumus yang digunakan adalah :

$$F = \frac{(n-k)\,/\,R2}{(k-1)/\,(1-R2)} \quad \text{..... (7)}$$

dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variable

n = Jumlah sampel

k –1 = Derajat kebebasan

n –k = Derajat kebebasan

3.3.4.3 Uji t (t-test)

Uji t statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel dependen lainnya konstan. Dalam uji-t digunakan hipotesis berikut :

Ho : bi = 0

Ha : bi ≠ 0

Dimana bi adalah koefisien variabel independent ke-i adalah nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap Y bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu (derajat kepercayaan 5%) Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :

$$T_{(\text{hitung})} = \frac{\beta i - \beta}{S\,\beta i} \quad \text{..... (8)}$$

Dimana :

βi = koefisien variabel independent ke-i

β = nilai hipotesis nol

Sβi = simpangan baku dari variabel independent ke-i

Kriteria pengambilan keputusan :

Ho : $\beta i = 0$ Ho diterima (t-hitung < t-tabel) artinya variabel independent secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta i \neq 0$ Ha diterima (t-hitung > t-tabel) artinya variabel independent secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

3.4. Operasional Variabel

Variabel Penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi (Arikunto,2002). Untuk menunjang pembahasan dan analisis maka perlu diungkapkan operasional variabel sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah salah satu bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang memilki kontribusi terbesar terhadap PAD setelah retribusi daerah yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun anggaran.
2. Pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi adalah merupakan salah satu bagian pajak daerah yang ada di Kota Jambi. Pajak penerangan jalan umum memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Pajak penerangan jalan umum merupakan keseluruhan jumlah realisasi penerimaannya selama sepuluh tahun terakhir.
3. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah rasio antara realisasi hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan target penerimaan Pajak

Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Jambi. Dengan Indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

4. Daya Pajak (*Tax Effort*). Dengan indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak, Produk Domestik Regional Bruto. Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kota Jambi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Fisik

Kota Jambi memiliki lokasi yang strategis karena berada pada bagian tengah dan timur Sumatera. Karena berdasarkan PP No. 6 tahun 1986 Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km ^{2} terletak diantara 01^0 30'2.98" Lintang Selatan sampai dengan 01^0 40'1.07" Lintang dan 103^0 30"1.67" Bujur Timur sampai dengan 103^0 40"0.22" Bujur Timur, terletak di bagian barat cekungan Sumatera Bagian Selatan yang disebut Sub Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah Sumatera Timur, maka Topografi Kota Jambi relatif datar.

Dilihat dari sudut topografi kota Jambi mempunyai sudut kemiringan permukaan tanah berkisar antara 0 % sampai 45 %. Dataran rendah dengan ketinggian maksimum lebih kurang 10 meter dari permukaan air laut, daerah bergelombang terdapat pada arah selatan dan utara serta banyak terdapat rawa di sepanjang aliran sungai Batanghari dan merupakan satu-satunya perairan yang ada di Kota Jambi, yang membelah kota Jambi menjadi dua bagian. Bagian Utara dengan 2 Kecamatan dan bagian Selatan dengan enam kecamatan.

Iklim kota Jambi sangat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim Barat dan musim Timur. Musim Barat angin bertiup dari ke arah Barat yang umumnya terjadi pada bulan April sampai Oktober dan musim Timur angin bertiup ke Selatan dan Timur yang umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai April.

Musim kemarau terjadi kira-kira bulan Mei sampai pada bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan oktober sampai bulan April. Curah hujan hampir sepanjang tahun, yaitu berkisar antara 2.000 - 2.500 mm.

Selain sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Dalam kerangka regional, Kota Jambi adalah daerah yang menghubungkan Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera, melalui jalan lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur alternatif yang memiliki keunggulan komperatif, dan sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional karena letak geografisnya yang sangat mendukung. Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional yakni Batam, Singapura, dan Johor.

Tabel 4.1

Luas Kecamatan dan jumlah Kelurahan

di Kota Jambi Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Kelurahan
1	Kotabaru	77,78	15
2	Jambi selatan	34,07	9
3	Jelutung	7,92	7
4	Pasar Jambi	4,02	4
5	Telanai Pura	30,39	11
6	Danau Teluk	15,7	5
7	Pelayangan	15,29	6
8	Jambi Timur	20,21	10
Jumlah		**205,38**	**62**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2010

Secara administratif, Kota Jambi terdiri dari delapan kecamatan yang terbagi dalam 62 kelurahan, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kotabaru 77,78 km^2 atau mencapai 37,8% luas kota (LK) Jambi disusu; kemudian kecamatan Jambi Selatan 16,6% LK, Telanaipura 14,8 %. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Pasar Jambi dengan luas 4.02 km^2 atau hanya 1,9% dari luas Kota Jambi. Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota Jambi terletak di Kecamatan Kotabaru.

Luas wilayah kota Jambi terdiri dari 54,87 persen merupakan pemukiman penduduk, lebih dari 20 persen daerah pertanian. Sebesar 19,90 persen untuk daerah perkebunan milik rakyat, selebihnya 5,42 persen tanah kosong, sungai 3,56 persen dan 2,05 persen kebutuhan lainnya. Pemanfataan ruang Kota Jambi ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2000-2009. dengan pertimbangan dinamika penduduk dan kegiatan perekonomian dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh kota.

4.1.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan

Secara teoritis, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh T. R. Malthus bahwa jumlah penduduk selalu meningkat jumlahnya menurut deret hitung sedangkan alat pemuas kebutuhan penduduk berupa barang dan jasa selalu meningkat menurut deret ukur. Keadaan yang sama juga terjadi pada penduduk Propinsi Jambi yang juga meningkat setiap tahunnya. Untuk mengetahui jumlah penduduk propinsi Jambi secara lebih jelasnya ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 4.2

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Jambi

Tahun 2000-2009

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2000	375.583	-
2001	398.520	6,1
2002	415.265	4,2
2003	426.568	2,72
2004	427.335	0,18
2005	432.541	1,21
2006	458.662	6,04
2007	470.902	2,67
2008	523.572	11,18
2009	576.038	10,02
Rata-rata Pertumbuhan		**4,43**

Sumber : BPS Kota Jambi 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Jambi berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Jambi sebesar 375.583. Selanjutnya selama periode penelitian 2000-2008 persentase rata-rata peningkatan jumlah penduduk di Kota Jambi sebesar 4,43 persen. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kota Jambi sebesar 398.520 jiwa atau meningkat sebesar 6,10 persen bila dibandingkan dengan tahun 2000. Dan pada tahun 2003 terjadi penurunan persentase peningkatan jumlah penduduk yang cukup berarti yaitu dari peningkatan 4,20 persen pada tahun 2002 menjadi 2,72 persen pada tahun 2003 dan kembali mengalami penurunan yang sangat pesat menjadi 0,18 persen pada tahun 2004, sementara pada tahun 2005 jumlah penduduk Kota Jambi kembali mengalami peningkatan menjadi 1,21 persen, sedangkan pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Jambi adalah sebanyak 458.662 jiwa, kemudian

mengalami peningkatan sebesar 6,04 persen pada tahun 2007 menjadi 470.902 jiwa dan pada tahun 2008 jumlah penduduk di Kota Jambi adalah sebanyak 523.572 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,18 persen. Sedangkan untuk tahun 2009 adalah 576.038 jiwa dengan pertumbuhan 10,02 persen. Secara rata-rata selama tahun 2000-2009 laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi adalah sebesar 4,43 persen, namun demikian apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi angka ini masih sangat tinggi atau masih di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,92 persen. Sementara itu pertambahan penduduk di Kota Jambi seyogyanya harus diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai pula. Dengan demikian seluruh angkatan kerja yang ada dapat tertampung dalam lapangan pekerjaan yang ada. Untuk lebih jelasnya keadaan tenaga kerja di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Keadaan Tenaga Kerja
Di Kota Jambi Tahun 2000-2009

Tahun	Bekerja (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Mencari Pekerjaan (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2000	140.186	-	12.886	-
2001	151.396	8,00	11.465	-11,03
2002	159.885	5,61	9.652	-15,81
2003	163.654	2,36	10.456	8,33
2004	164.201	0,33	9.666	-7,56
2005	168.594	2,68	9.761	0,98
2006	182.562	8,28	8.975	-8,05
2007	191.561	4,93	9.584	6,79
2008	225.510	17,72	9.321	-2,74
2009	235.769	4,54	9.273	-3,64
Rata-rata		**6,05**		**-3,64**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk bekerja di Kota Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, selama tahun 2000-2008 jumlah penduduk yang bekerja di Kota Jambi secara rata-rata mengalami perkembangan sebesar 6,05 persen. Pertumbuhan penduduk yang bekerja tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 17,72 persen sedangkan pertumbuhan penduduk yang bekerja terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 0,33 persen.

Di sisi lain jumlah penduduk mencari pekerjaan di kota Jambi juga menunjukkan pertumbuhan yang negatif, meskipun pada tahun 2003,2005 dan tahun 2007 jumlah penduduk mencari pekerjaan mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk mencari pekerjaan tertinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu sebesar 8,33 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar -15,81. Secara rata-rata penduduk Kota Jambi yang mencari pekerjaan mengalami penurunan sebesar 3,64 persen.

4.1.3 Struktur Perekonomian

4.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hasil pembangunan yang telah dicapai dan perencanaan yang akan dibuat membutuhkan bermacam-macam data / parameter Statistik, yang berguna untuk mengevaluasi kebijaksanaan pembangunan sektoral di masa lalu dan melihat hasilnya. Berbagai data/ parameter statistik mutlak di perlukan untuk memberikan

gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Salah satu data/ parameter statistik yang dibutuhkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha. Melalui data tersebut diperoleh gambaran skala prioritas pembangunan daerah atau regional, serta kemajuan sektornya. Tingkat Pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah.

Indikator-indikator tersebut merupakan bahan acuan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah dan akan dilakukan. Hasil penghitungan PDRB Lapangan Usaha diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah secara utuh. Meskipun PDRB memiliki kelemahan karena mengabaikan faktor dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan ekonomi. Biaya kerusakan lingkungan tersebut dianggap nol. Oleh karenanya, perlu dikembangkan PDRB dengan memperhitungkan dampak lingkungan. Atau lebih dikenal dengan PDRB *Green.*

Hingga saat ini pendapatan nasional dan daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah. Dalam kerangka ini maka perkembangan PDRB yang tercemin dari laju pertumbuhan perekonomian secara sektoral harus tumbuh secara kokoh terutama berkaitan dengan potensi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kepada potensi daerah akan memberikan nilai tambah yang lebih besar, sehingga produk yang dihasilkan akan

memiliki daya saing. Gambaran perkembangan PDRB sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.

PDRB Kota Jambi Tahun 2000-2009

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB ADHK Tahun 2000 (Rp.)
2000	1.970.945
2001	2.074.957
2002	2.151.399
2003	2.255.715
2004	2.372.028
2005	2.506.910
2006	2.655.445
2007	2.845.548
2008	3.020.121
2009	3.124.122

Sumber : Bappeda Kota Jambi

Gambar 4.1.

PDRB Kota Jambi Tahun 2000-2009

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

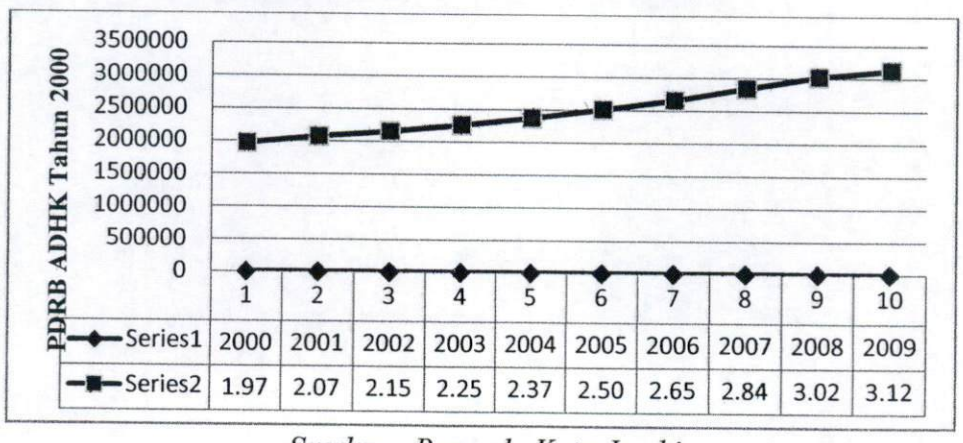

Sumber : Bappeda Kota Jambi

Indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur Pembangunan Ekonomi dan pertumbuhannya adalah besaran dan Perkembangan Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Selama kurun waktu 2000-2009 terlihat bahwa PDRB Kota Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi cukup moderat. Indikator tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi krisis ekonomi nasional, tapi perekonomian Kota Jambi masih mampu bertahan dan bahkan berkembang. PDRB Kota Jambi dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

4.1.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk diperhatikan karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan dengan kepekaan terhadap sumber penerimaan daerah yang ada, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, bantuan atau sumbangan dari daerah tingkat I dan dari pemerintah pusat serta pendapatan lain-lain dari sisi pembangunan. Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2000-2009 selalu mengalami peningkatan dengan rincian belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, dan belanja pembiayaan.Perkembangan APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.5

Realisasi APBD Kota Jambi

Tahun Anggaran 2000 - 2009

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rp)
2000	87.690.899.000
2001	157.238.348.000
2002	194.757.864.000
2003	284.509.925.000
2004	310.925.593.000
2005	471.591.470.000
2006	515.160.690.000
2007	552.969.526.000
2008	623.507.000.000
2009	657.309.000.000

Sumber : BPS Sumbar

Unuk realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Jambi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disumbangkan oleh kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan. Selain itu, Hal tersebut juga disebabkan karena meningkatnya anggaran rutin yang meningkat secara drastis akibat dari bertambahnya jumlah pegawai yang diserahkan pembelanjaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, dengan adanya pelimpahan kewenangan berupa pemungutan pajak daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat diharapkan akan berkurang. Sebagai salah satu

komponen pembentuk PAD, pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan PAD Kota Jambi. Pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdsarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi.

Penerimaan Pajak Daerah tertinggi secara persentase dicapat pada tahun 2004 sebesar 133,35%. Dimana salah satu faktor pendukung tingginya pencapaian persentase tersebut adalah besarnya realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari target Rp. 7.200.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 10.387.792.462,- atau 144,27%. Sedangkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula dipungut oleh Dipenda Kota Jambi, sejak tahun 2003 dipungut oleh Dipenda Propinsi. Untuk lebih jelasnya penerimaan pajak daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi

Tahun Anggaran 2000 - 2009

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	3.029.178.000	3.388.869.753	111,87%
2001	4.923.777.000	5.257.627.682	106,78%
2002	6.418.000.000	7.412.668.179	115,50%
2003	7.049.440.000	8.712.686.970	123,59%
2004	11.613.408.000	15.486.317.484	133,35%
2005	15.150.000.000	17.221.991.926	113,68%
2006	17.472.000.000	19.254.463.157	110,20%
2007	18.012.429.000	20.581.937.289	114,27%
2008	21.432.801.000	24.433.740.195	114,00%
2009	26.523.341.961	28.842.152.696	108,74%

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2000-2009 penerimaan pajak daerah Kota Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Selama periode 2000-2009 rata-rata peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Jambi adalah sebesar 115,20 persen pertahun.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 133,35%. Tingginya laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Jambi pada tahun ini disebabkan karena pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan pemberlakuan secara efektif Undang-Undang nomor 22 dan 23 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya termasuk dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Jambi terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 106,78%. Rendahnya laju pertumbuhan pada tahun 2001 ini lebih disebabkan karena menurunnya basis penerimaan pajak secara riil, atau menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Di samping itu penurunan ini juga disebabkan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang dilakukan pemerintah, hal ini berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyaknya kasus korupsi. Selama periode 2000 - 2009 secara rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah di atas target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 115,20%.

Pencapaian realisasi ini memberikan gambaran bahwa dalam pemungutan pajak daerah di Kota Jambi sudah sangat efektif.

Undang-undang tentang Pajak Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1057 tentang Pajak Daerah, sampai dengan Tahun 1998/1999 Pajak Daerah terdiri dari 12 jenis pajak.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah disederhanakan sehingga menjadi 5 jenis pajak. Dalam perkembangan berikutnya Undang-undang No. 18 Tahun 1997 diubah/direvisi dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan jenis Pajak Daerah di Kota Jambi menjadi 6 jenis. Jumlah tersebut bertambah sesuai dengan potensi yang ada. Pajak Daerah yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dan Restoran

   Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Sedangkan subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran. Yang merupakan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Total Penerimaan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2000-2009 adalah Rp.31.553.488.835,-. Apabila diurutkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya, Pajak Hotel

dan Restoran menempati urutan kedua dalam kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi.

2. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang perseorangan. Dengan jumlah total penerimaan pajak hiburan untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu Rp.6.250.548.806,-.

3. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame demikian pula wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah juga tergolong besar yang menduduki posisi ketiga dengan total penerimaannya selama tahun 2000 - 2009 yaitu sebesar Rp. 21.152.493.681,-

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerang jalan, yang

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna listrik. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak daerah yang menjadi primadona karena memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pajak Daerah di Kota Jambi. Yang mana jumlah total penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum selama tahun anggaran 2000 - 2009 yaitu sebesar Rp.10.387.792.462,-

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Subjek pajak dan sekaligus wajib pajak nya adalah orang pribadi yang mengambil bahan galian golongan C. Untuk tahun anggaran 2000 - 2009 kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C belum terlalu besar yaitu sebesar Rp. 3.131.219.982,-

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula dipungut oleh Dipenda Kota Jambi, sejak tahun 2003 dipungut oleh Dipenda Propinsi. Tetapi, pada tahun anggaran 2000 - 2002 penerimaan atas Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan yang dipungut oleh Dipenda Kota Jambi adalah berjumlah Rp.549.745.769,- Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan sekarang, pemungutannya dilakuakan oleh Dipenda Propinsi Jambi.

4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan sejenis pungutan berupa pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PPJU ditetapkan berdasarkan PERDA yang merupakan kewenangan Pemda dan DPRD setempat. Sebagai salah satu PAD, maka PPJU menjadi sumber pendapatan bagi Pemda setempat yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah. Peranan PLN dalam masalah PPJ ini adalah untuk memungut dan mengumpulkan PPJ yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71. A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993.

Meskipun PJU itu tidak mungkin dilepaskan dari pasokan aliran listrik, tetapi PLN bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola PJU. Di Kota Jambi, pengelolaan PJU menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat. Sementara itu, batas kewenangan dan tanggung jawab PLN hanya dalam hal penyediaan aliran listrik. Instansi

dilingkungan Pemda yang mengelola PJU antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Pengelolaan PJU ini meliputi seluruh aktifitas pekerjaan yang erat kaitannya dengan PJU, yang diantaranya yaitu Perencanaan PJU, Penambahan dan Perluasan PJU, Pemasangan jaringan PJU Pemeliharaan dan perbaikan PJU, dan Pengawasan PJU.

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Kota Jambi merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT. PLN Persero Kota Jambi yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening listrik yang kemudian disetorkan ke DIPENDA. Penyediaan dan perawatan dari penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.

Potensi penerangan jalan di Kota Jambi masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki penerimaan terbesar alam pos pajak daerah Kota Jambi. Selain itu, wajib pajak dalam hal ini masyarakat memiliki andil yang besar dalam penerangan jalan, mereka memiliki ketaatan membayar pajak yang tinggi sehingga penerimaan pajak penerangan jalan cenderung bisa ditingkatkan. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan diharapkan setiap daerah akan memiliki penerangan sebanyak mungkin. Pajak penerangan jalan dipungut dari seluruh pelanggan PLN di Kota Jambi baik yang berada di Rayon Telanaipura, Kotabaru, maupun Seberang Kota Jambi. Seluruh pelanggan PLN dikenakan pajak, yang dikenakan sebesar 7 persen dari pemakaian KWH.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi

Di Kota Jambi, Pajak Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pajak daerah. Untuk lebih jelasnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.

Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Umum

Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 – 2009

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (Rp)	Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Umum (%)
2000	1.778.414.860	-
2001	2.727.464.580	53,36
2002	3.956.536.904	45,06
2003	4.466.783.190	12,89
2004	10.387.792.462	132,55
2005	10.889.428.737	4,82
2006	11.892.975.402	9,21
2007	11.699.863.084	-1,62
2008	13.552.547.087	15,83
2009	16.623.178.955	22,65
Rata-rata		**32,75%**

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi, (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2000-2009 penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi menunjukkan perkembangan yang mengalami penurunan dan peningkatan. Walaupun total realisasi penerimaannya

secara nominal selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya, tetapi hal tersebut tidak menjamin persentase laju pertumbuhan perkembangannya yang mangalami pasang surut selama sepuluh tahun terakhir. Secara rata-rata, persentase pertumbuhan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi adalah sebesar 32,75 %.

Laju pertumbuhan perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan umum tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 132,55%. Tingginya laju pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan umum Kota Jambi pada tahun ini disebabkan karena peran kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, pada tahun 2004 tersebut berlangsung berbagai proyek pembangunan daerah di Kota Jambi yang mulai berkembang secara pesat seperti semakin banyaknya dibangunnya perumahan susun, lalu berkembangnya jalan lintas sumatera serta jalan lingkar lingkungan sehingga berujung pada peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan umum secara nominal.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan umum Kota Jambi terendah terjadi pada tahun 20007, yaitu sebesar -1,62%. Rendahnya laju pertumbuhan pada tahun 2007 ini lebih disebabkan karena menurunnya basis penerimaan pajak secara riil, atau menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan pendapatan perkapita. Di samping itu penurunan ini juga disebabkan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang dilakukan pemerintah, hal ini berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyaknya kasus korupsi.

Berdasarkan gambar 5.1 di bawah ini juga terlihat bahwa selama periode 2000 - 2009 secara realisasi perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan umum menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun) dan berada di atas target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi ini memberikan gambaran bahwa dalam pemungutan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi sudah sangat efektif.

Gambar 5.1.

Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Umum

Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 – 2009

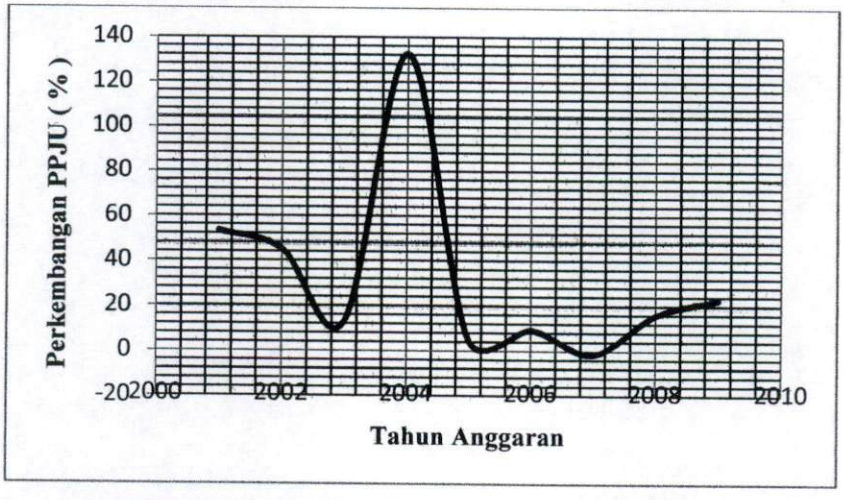

Sumber : DIPENDA Kota Jambi, (Data Diolah)

5.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi

Pajak Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pajak Daerah, dimana salah satu komponen pembentuk Pajak Daerah. Peningkatan pajak penerangan jalan umum dapat mendorong peningkatan pajak daerah. Selama periode 2000-2009 kontribusi pajak

penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Jambi menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum
Terhadap Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2000 - 2009

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pajak Penerangan Jalan Umum (Rp)	Kontribusi (%)
2000	3.388.869.753	1.778.414.860	53,26
2001	5.007.264.460	2.597.585.314	51,87
2002	6.800.613.008	3.629.850.371	53,37
2003	7.650.602.606	3.918.230.868	51,21
2004	12.905.264.600	8.656.493.717	67,07
2005	13.560.623.600	8.574.353.300	63,22
2006	14.262.565.300	8.809.611.400	61,76
2007	14.293.012.000	8.124.904.900	56,84
2008	15.969.764.800	8.857.873.900	55,46
2009	18.254.527.000	10.520.999.300	57,63
Rata-rata			**57,17**

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi, (Data Diolah)

Tabel 5.2. menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah Kota Jambi dari tahun 2000 hingga 2009 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), dimana pada tahun 2000 kontribusinya tercatat sebesar 53,26 persen. Namun pada tahun selanjutnya kontribusi nya mengalami penurunan dimana penurunannya tercatat sebesar 1,39 persen dengan tingkat kontribusinya sebesar 51,87 persen, dan tahun 2002 kontribusi nya mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen. Sedangkan tahun selanjutnya mengalami penurunan kembali.

Dengan adanya kondisi yang seperti ini, maka diperlukan upaya Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Jambi dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan khususnya pajak penerangan jalan Umum, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Jambi sekaligus juga berdampak kepada perekonomian daerah dan pendapatan perkapita masyarakat yang semakin meningkat.

Dengan adanya upaya peningkatan tersebut, maka kontribusi untuk tahun selanjutnya cenderung mengalami peningkatan dimana peningkatan nya tercatat sebesar 15,86 persen dengan kontribusi nya sebesar 67,07 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja pengelolaan pajak penerangan jalan (sebagai komponen utama) dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Jambi sangat efisien dan efektif, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal nya, internalnya seperti penetapan tarif yang tidak terlalu tinggi dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat nya, pemungutan dan pembayaran secara efektivitas, pencatatan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, adanya pengawasan, pemberian sanksi yang tegas bagi setiap orang yang menunggak dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola pajak penerangan jalan umum dan menempatkan nya sesuai dengan latar belakang atau spesialisasi ilmu yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternalnya dapat dilihat dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan wajib pajak, khususnya pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Berdasarkan gambar 5.2 di bawah ini juga terlihat bahwa selama tahun anggaran 2000 – 2009, kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah di Kota Jambi mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak penerangan jalan umum memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerahdi Kota Jambi yang berarti juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Jambi.

Gambar 5.2.

Kontribusi PPJU terhadap Pajak Daerah

Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 - 2009

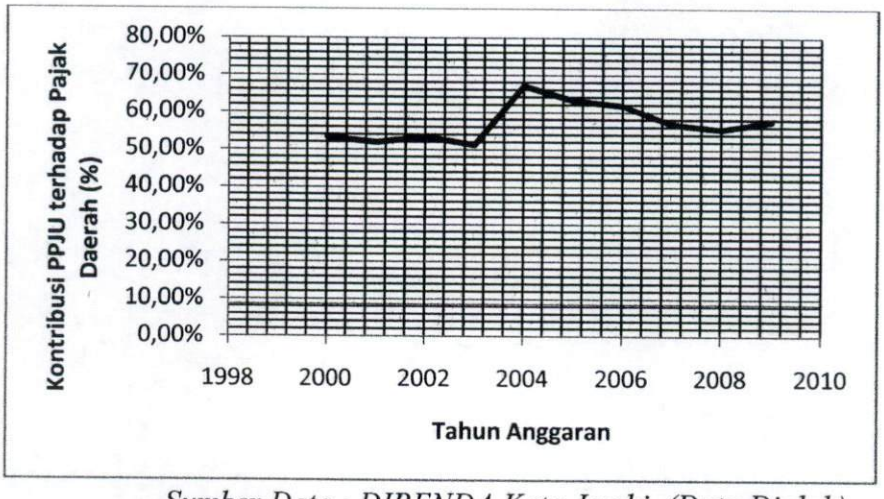

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi, (Data Diolah)

5.3 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi

Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada

Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2000 - 2009 diketahui bahwa efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum untuk tahun 2000 - 2009 tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.

Perhitungan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Umum

Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2000 – 2009

Tahun	Target Penerimaan PPJU (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJU (Rp)	Efektifitas PPJU (%)	Kriteria Efektifitas
2000	1.705.244.000	1.778.414.860	104,29	Sangat Efektif
2001	2.480.174.286	2.597.585.314	107,73	Sangat Efektif
2002	3.247.706.400	3.629.850.371	111,77	Sangat Efektif
2003	3.105.263.100	3.918.230.868	126,18	Sangat Efektif
2004	6.000.000.000	8.656.493.717	144,27	Sangat Efektif
2005	7.874.015.700	8.574.353.300	108,89	Sangat Efektif
2006	8.364.444.400	8.809.611.400	105,32	Sangat Efektif
2007	7.847.222.200	8.124.904.900	103,54	Sangat Efektif
2008	8.496.732.000	8.857.873.900	104,25	Sangat Efektif
2009	9.810.126.500	10.520.999.300	107,25	Sangat Efektif

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi, Data diolah

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi sudah sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi dapat mencapai potensi penerimaan riilnya. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah harus bisa lebih meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar efektivitas pajak ini penerimaannya senantiasa dapat selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

5.4 Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto.

Dari semua hasil perhitungan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2000 - 2009 diketahui bahwa tax effort Pajak Penerangan Jalan Umum untuk tahun 2000 - 2009 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.4.

Hasil Perhitungan Daya Pajak (Tax Effort)

Realisasi Pajak Daerah Di Kota Jambi

Tahun Anggaran 2000 – 2009

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	PDRB Kota Jambi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Rp)	Daya Pajak (%)
2000	3.388.869.753	1.970.945.000	17,1
2001	5.007.264.460	2.074.957.000	24,1
2002	6.800.613.008	2.151.399.000	31,6
2003	7.650.602.606	2.255.715.000	339
2004	12.905.264.600	2.372.028.000	54,4
2005	13.560.623.600	2.506.910.000	54
2006	14.262.565.300	2.655.445.000	53,7
2007	14.293.012.000	2.845.548.000	50,2
2008	15.969.764.800	3.020.121.000	52,9
2009	18.254.527.000	3.124.122.000	58,3
Rata-rata			73,53

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi, Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, terlihat pada Tabel 5.4 tersebut bahwa selama sepuluh tahun terakhir, daya pajak mengalami peningkatan yang signifikan, dengan persentase rata-ratanya selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 73,53%. Daya Pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kota Jambi tergolong sudah cukup baik karena persentase yang dihasilkan dari perhitungan daya pajak tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak, mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat membayar pajak di Kota Jambi masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan membayar dari masyarakat maka pemerintah daerah dapat dilakukan dengan membangun kestabilan ekonomi dan politik sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bayar masyarakat di suatu daerah. Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajaknya meningkat.

5.5 Hasil Pengujian Regresi

Perhitungan empiris dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang berdasarkan pada data time series dari tahun 2000 - 2009, dengan judul Analisis

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Jambi . Dimana variabel terikat (*dependent variabel*) pada pembahasan ini adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (Y), sedangkan variabel bebas (*independent variabel*) nya adalah Efektifitas (X_1), dan Daya Pajak (*Tax Effort*) (X_2).

Dari perhitungan variabel- variabel tersebut diperoleh hasil persamaan regresinya sebagai berikut :

$$\begin{array}{lcccc} \text{Log Y} & = & 6{,}655 & + & 0{,}374\,X_1 \\ & & (15{,}114) & & (1{,}741) \end{array} + \begin{array}{c} 1{,}484\,X_2 \\ (27{,}671) \end{array}$$

$R^2 = 0{,}991$

$F_{hit} = 386{,}637$

D-W = 1,585

Berdasarkan hasil empiris dapat dikemukakan bahwa variabel bebas (Efektifitas dan Daya Pajak / Tax Effort) berhubungan positif terhadap variabel terikat (Pajak Penerangan Jalan Umum).

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 tercatat sebesar 0,991 yang berarti bahwa variabel efektifitas dan daya pajak / tax effort (variabel bebas) mampu mempengaruhi pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi sebesar 99,1 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model ini.

Untuk menentukan apakah secara bersama-sama *independent variabel* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dependent variabel*, maka perlu dilakukan uji F. Dimana Pengujian dilakukan dengan membandingkan F-hitung

dengan F-tabel pada derajat kepercayaan 95 persen. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai F- hitung sebesar 386,637 sedangkan nilai F-tabel sebesar 19,4. Maka F-hitung lebih besar dari F-tabel dan ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi atau terdapat pengaruh yang sangat nyata (*highly significant)* dari variabel efektifitas dan daya pajak terhadap pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi.

Untuk menentukan apakah hasil analisis regresi mengandung autokorelasi maka dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW) nya, dimana nilai DW dari hasil analisis regresi di atas tercatat sebesar 1,585. Hal ini bearti tidak ada keputusan atau kesimpulan yang dapat diambil tentang adanya autokolerasi.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien variabel independen terhadap variabel dependen (apakah signifikan atau tidak) maka dapat dilakukan uji t. Dari persamaan di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 6,655 artinya jika efektifitas dan daya pajak nilainya adalah 0, maka Y nilainya sebesar 6,655.

Apabila diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel efektifitas sebesar 0,374 dengan t-hitungnya sebesar 1,741 dan t-tabelnya sebesar 2,363. Nilai t-hitung yang lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel berarti menandakan bahwa efektifitas memiliki hubungan yang positif dan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pajak penerangan jalan umum.

Selanjutnya variabel daya pajak (*Tax Effort*) yang memiliki nilai koefisien sebesar 1,484 dengan t-hitungnya sebesar 27,671 dan t-tabel sebesar 2,365. Nilai

t-hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel dapat dikatakan bahwa daya pajak memiliki hubungan yang positif terhadap pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi. dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penerangan jalan umum atau *Tax Effort* memperlihatkan perubahan yang berarti terhadap pajak penerangan jalan umum Kota Jambi, dimana pada tingkat kepercayaan 95 persen (α = 5 persen) pengaruhnya signifikan. Jika daya pajak (*tax effort*) naik sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pajak penerangan jalan umum Kota Jambi sebesar 1,484 persen.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama periode 2000 - 2009 secara realisasi perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan umum menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun). Walaupun total realisasi penerimaannya secara nominal selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya, tetapi hal tersebut tidak menjamin persentase laju pertumbuhan perkembangannya yang mangalami pasang surut selama sepuluh tahun terakhir.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah Kota Jambi dari tahun 2000 hingga 2009 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun). Di sisi lain secara rata-rata selama 10 (sepuluh) tahun terakhir tersebut kontribusi pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi adalah sebesar 57,17 %.
3. Secara parsial variabel yang memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi adalah daya pajak (*Tax Effort*). Sedangkan, variabel efektifitas memiliki hubungan positif tetapi pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi. Hal tersebut dikarenakan formula yang seharusnya digunakan dalam perhitungan

efektifitas adalah realisasi per potensi pajak penerangan jalan umum, tetapi karena adanya keterbatasan data yang diperoleh maka penulis menggunakan formula perhitungan efektifitas dari sumber yang lain yaitu realisasi per target penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Jambi.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa kritik dan saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak penerangan jalan umum memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Jadi, Pemerintah Kota Jambi hendaknya secara bersungguh-sungguh mengelola dan memungut pajak penerangan jalan umum dengan mendorong efektifitas serta daya pajaknya, sehingga penerimaan pajak penerangan jalan umum meningkat setiap tahunnya yang nantinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berguna untuk pembiayaan pembangunan daerah.
2. Untuk penelitian berikutnya, dianjurkan kepada peneliti agar dalam perhitungan efektifitas pajak dapat menggunakan formula yang sesuai pada literatur dan penelitian sebelumnya yaitu realisasi per potensi pajak penerangan jalan umum, Hal tersebut bertujuan agar dalam perhitungan uji empiris yang bersifat deskriftif kuantitatif akan diperoleh hasil yang lebih baik mendekati signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1997, *Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Departemen Dalam Negeri*

_____,1999, *Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah.*

_____,1999, *Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*

_____,2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

_____, 2000, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

_____, 2010, *Perhitungan PDRB Tahun 2000-2009, Bappeda dan BPS Propinsi Jambi*, Jambi

_____, 2010, *Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2000-2009, Dipenda Kota Jambi*, Jambi

Ahmad, Kamaludin, 1997. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat – Daerah di Indonesia* : Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta, Desertasi Doktor Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rhineka Cipta.

Bintoro, Tjokroamijoyo, 1995, *Perencanaan Pembangunan*, LP 3ES, Jakarta

Depdagri, 1997, *Kepmendagri No.690.900.327.1996, " Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan".*

_____, 2007, *Kepmendagri No. 59. 2007. " Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah".*

Devas, Nick, Anne Both, Bryan Binder, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.

Fitriadi, 1999, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Pajak (Tax Capacity dan Usaha Pajak (Tax Effort) Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur*, Tesis Unpad (Tidak Dipublikasikan).

Gujarati, Damodar, 1995, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Rajawali Press, Jakarta

Guritno Mangkoesoebroto. 1997. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta : BPFE

Imam Bactiar. 2003. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus: Kabupaten Garut).* Skripsi S1 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang

Kakisina dan Rumansa, DMP, 1991, *Alternatif Reformasi Kebijaksanaan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Prisma Edisi Agustus, LP3ES, Jakarta

Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunann, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya*, LP3ES, Jakarta.

Kuncoro, 2001. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi) Edisi 1*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN. Yogyakarta.

Linda, Junita. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD (Studi Kasus: Propinsi Jambi).* Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Jambi.

Mardiasmo, 2002, " *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2002*". Makalah Seminar *HIMMEP*, Yogyakarta.

_____, 2003. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001. *Tentang Pajak Daerah.* Departemen Dalam Negeri

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2002. 2002. *Tentang Pajak Penerangan Jalan*. Kota Jambi.

Silalahi, Pande Radja, 2000. "*Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di daerah*", *Analisis CSIS*, No. 1, Tahun XXIX, 4-12.

_____, 2002, *Kebijaksanaan Desentralisasi Fiskal*, LPM FE-UI, Jakarta

Sutrisno. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang). Tesis* S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.* Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Hg.Triyanto, 1995, *Indikator Ekonomi*, Cetakan Kesembilan, Kanisius, Yogyakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Realisasi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun anggaran 2000 - 2009
(Rupiah)

Pajak Daerah	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pajak Hotel	825.543.476	1.494.161.119	1.701.758.887	2.122.177.918	1.015.662.878	1.212.848.182	1.235.462.501	1.502.955.084	1.741.688.447	2.033.901.705
2. Pajak Restoran					1.367.473.748	1.815.339.194	2.412.509.095	2.903.958.949	3.775.976.825	4.372.070.824
3. Pajak Hiburan	155.111.994	240.496.560	301.091.320	311.210.641	496.580.001	559.529.418	663.099.846	746.768.559	1.191.204.567	1.585.455.897
4. Pajak Reklame	295.450.514	466.283.088	1.139.655.841	1.578.104.305	2.016.228.434	2.324.822.736	2.706.729.842	3.030.638.743	3.686.129.829	3.908.450.346
5. Pajak Penerangan Jalan	1.778.414.860	2.727.464.580	3.956.536.904	4.466.783.190	10.387.792.462	10.889.428.737	11.892.975.402	11.699.863.084	13.552.547.087	16.623.178.955
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C	164.694.976	132.417.658	130.365.063	234.410.915	202.579.958	420.023.659	343.686.470	697.752.870	486.193.440	319.094.969,00
7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	169.653.930	196.831.676	183.260.162	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : DIPENDA Kota Jambi

LAMPIRAN II

PDRB Kota Jambi Tahun 2000-2009 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	54.736	56.959	57.944	58.341	59.386	60.601	61.987	63.463	64.817	66.257
Pertambangan	161.526	203.717	181.484	185.308	175.399	173.169	173.891	172.867	172.106	179.819
Industri	383.900	424.732	435.153	444.074	450.267	465.608	488.531	519.258	549.580	559.703
Listrik dan Air bersih	37.249	40.711	45.187	53.511	60.558	64.644	68.437	72.600	76.872	79.975
Bangunan	74.583	75.377	94.185	121.689	143.697	165.473	182.385	201.180	218.702	230.609
Perd.Hotel & Rest	446.259	456.264	470.078	489.144	507.484	554.429	608.510	668.954	729.423	739.918
Peng & komunikasi	369.858	395.423	422.618	446.053	480.169	505.155	533.083	567.392	589.647	597.880
Keu & Persewaan	152.787	122.311	129.769	137.060	165.780	179.833	190.250	220.679	248.529	277.971
Jasa-jasa	290.048	299.464	314.980	320.537	329.289	337.998	348.371	359.155	370.445	391.990
Jumlah	**1.970.945**	**2.074.957**	**2.151.399**	**2.255.715**	**2.372.028**	**2.506.910**	**2.655.445**	**2.845.548**	**3.020.121**	**3.124.122**

Sumber : Bappeda kota Jambi Tahun 2010

LAMPIRAN III

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pajak Penerangan Jalan Umum	9.7500	.27293	10
Efektifitas	2.0490	.04606	10
Tax Effort	2.6030	.18463	10

Correlations

		Pajak Penerangan Jalan Umum	Efektifitas	Tax Effort
Pearson Correlation	Pajak Penerangan Jalan Umum	1.000	.097	.994
	Efektifitas	.097	1.000	.160
	Tax Effort	.994	.160	1.000
Sig. (1-tailed)	Pajak Penerangan Jalan Umum	.	.395	.000
	Efektifitas	.395	.	.330
	Tax Effort	.000	.330	.
N	Pajak Penerangan Jalan Umum	10	10	10
	Efektifitas	10	10	10
	Tax Effort	10	10	10

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tax Effort, Efektifitas[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.996[a]	.991	.988	.02932	.991	386.537	2	7	.000	1.585

a. Predictors: (Constant), Tax Effort, Efektifitas

b. Dependent Variable: Pajak Penerangan Jalan Umum

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.664	2	.332	386.537	.000[a]
	Residual	.006	7	.001		
	Total	.670	9			

a. Predictors: (Constant), Tax Effort, Efektifitas

b. Dependent Variable: Pajak Penerangan Jalan Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	6.655	.440		15.114	.000			
	Efektifitas	.374	.215	.063	1.741	.125	.097	.550	.062
	New Tax Effort	1.484	.054	1.004	27.671	.000	.994	.995	.991

a. Dependent Variable: PJU

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.2075	10.0049	9.7500	.27170	10
Residual	.03682	.04252	.00000	.02585	10
Std. Predicted Value	1.997	.938	.000	1.000	10
Std. Residual	1.256	1.450	.000	.882	10

a. Dependent Variable: Pajak Penerangan Jalan Umum